

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### **6.1 Kesimpulan**

Untuk mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan keberhasilan implementasi PIPPK di Kecamatan Panyileukan, dapat kita analisa melalui teori implementasi Edward III dan melihat apakah ada faktor lain yang ditemukan di lapangan.

Dari segi jumlah sumber dana PIPPK dinilai sudah cukup membantu dalam rangka menjadi stimulan bagi sawdaya masyarakat. Dari penyerapan sumberdaya anggaran PIPPK tahun 2015 di kecamatan panyileukan juga sudah cukup besar yaitu 99,39% dari seluruh anggaran yang diberikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran PIPPK tahun 2015 di kecamatan PIPPK cukup besar hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi dan kemampuan LKK dalam melaksanakan kegiatan PIPPK cukup baik.

Dari segi Komunikasi ada tiga hal yang penting untuk diteliti yaitu dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dari data yang peneliti dapatkan dari lapangan komunikasi ditransmisikan melalui sosialisasi dari pihak aparaturnya kewilayahan kepada LKK dengan cara mengundang LKK maupun turun langsung kelapangan. Dengan adanya sosialisasi ini maka dapat disimpulkan bahwa dimensi transmisi telah terpenuhi. Selanjutnya dimensi kejelasan. Dari data yang peneliti dapatkan di lapangan sosialisasi sudah disampaikan dengan cukup jelas sesuai dengan juknis yang

berlaku namun masih ada segelintir pihak yang seakan tidak mengerti bahwa PIPPK bukan berupa uang. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa secara umum sosialisasi yang diberikan sudah cukup jelas. Selanjutnya adalah dimensi konsistensi. Dari data yang peneliti dapatkan sosialisasi dilakukan disetiap fase pelaksanaan PIPPK baik disaat perancangan kegiatan pembangunan, monitoring pada saat pelaksanaan pembangunan dan juga evaluasi setelah suatu kegiatan pembangunan selesai. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dimensi konsistensi telah terpenuhi.

Dari segi Disposisi ada dua Indikator yang menjadi tolok ukur yang pertama adalah dimensi Kognitif yaitu pengetahuan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan dan dimensi afektif yaitu kemauan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kegiatan. Dari data yang peneliti temukan dilapangan, dari segi pengetahuan Awalnya aparatur kewilayahan dan juga LKK bingung dalam melaksanakan PIPPK dikarenakan dasar hukum yang sering terjadi perubahan, sehingga dalam teknis pelaksanaannya mengalami kebingungan. Namun setelah dasar hukum sudah jelas dan aparatur kewilayahan berkonsultasi dengan Tim Pengarah PIPPK Kota Bandung sehingga akhirnya pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Panyileukan bisa berjalan dengan lancar hingga bisa menyerap 99,39 % anggaran. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kendala tetap ada yaitu kendala ketidakjelasan informasi/ dasar hukum namun hal tersebut bisa diatasi oleh aparatur kewilayahan sehingga bisa di mengerti pula oleh LKK. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan mampu mengetahui kebijakan tersebut

sehingga aspek kognitif terpenuhi. Selanjutnya adalah aspek afektif. Dari data yang didapatkan peneliti di lapangan antusiasme Aparatur kewilayahan dalam menjalankan PIPPK sangat tinggi terlihat dari kesungguhannya dalam menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam juknis dan bertanggung jawab kepada Tim Pengarah PIPPK Kota Bandung. Sedangkan ditingkat LKK sempat terjadi *miss persepsi* mengenai penerapan PIPPK namun pada akhirnya dapat ditanggulangi dengan cara sosialisasi dan monitoring oleh pihak aparaturnya kewilayahan. Tingginya tingkat disposisi ini dipengaruhi oleh insentif yang diberikan, yakni berupa penghargaan PIPPK Awards.

Dari segi struktur birokrasi ada dua dimensi yang menjadi indikator keberhasilan yaitu SOP dan Fragmentasi. Terdapat SOP dalam pelaksanaan PIPPK di tahun 2015 yaitu Juknis PIPPK Tahun 2015. Dari data yang didapat di lapangan Juknis PIPPK dinilai sangat bermanfaat meskipun pada awalnya ada beberapa perubahan dasar hukum dan juga program ini merupakan program baru dengan metode pelaksanaan yang baru juga jadi Aparatur kewilayahan sempat mengalami kebingungan, sehingga LKK pun mengalami kebingungan. Namun lambat aparaturnya kewilayahan semakin memahami juknis dari berbagai upaya seperti mengundang narasumber dari Tim Pengarah PIPPK Kota Bandung untuk berkonsultasi sehingga mampu melaksanakan PIPPK sesuai dengan juknis. Di segi fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dapat dilihat di SK Tim Pengarah Kecamatan bahwa penyebaran tanggung jawab tidak terlalu luas. Untuk mewakili seluruh LKK yang

tersebar di kecamatan panyileukan diwakili oleh Ketua LPM kecamatan, Ketua Forum RW kecamatan, Ketua PKK kecamatan dan Ketua Karang Taruna Kecamatan.

Data tersebut menggambarkan bahwa kendala kadang terjadi baik di pihak aparatur kewilayahan maupun LKK. Namun dengan segenap upaya kedua organisasi ini baik aparatur kewilayahan maupun LKK dapat menjalankan perannya dengan baik. Aparatur kewilayahan mampu mengarahkan LKK sesuai Juknis dan meningkatkan partisipasi LKK dengan berbagai cara sosialisasi. LKK pun dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan PIPPK baik dalam tahap pengajuan proposal, pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai evaluasi. Kedua peran ini yang mengakibatkan terjadinya sinergitas antara aparatur kewilayahan dan LKK di kecamatan Panyileukan.

Untuk faktor lain, peneliti menemukan temuan bahwa terdapat sentra pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat inovasi dan kreatifitas dalam Kecamatan Panyileukan.

Dari data tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa dengan dana yang cukup, penyerapan dana yang tinggi, terdapat transmisi komunikasi, terdapat komunikasi yang jelas, terdapat komunikasi yang konsisten, terpenuhinya aspek kognitif, terpenuhinya aspek afektif, terdapat SOP yang membantu dan Fragmentasi yang kecil dan terdapat inovasi dan kreativitas mewujudkan keberhasilan Implementasi PIPPK Kota Bandung Tahun 2015 di Kecamatan Panyileukan.

## 6.2 Saran

Untuk sumber daya Manusia, kinerja aparatur kewilayahan sebagai pembimbing dan pengawas LKK dalam kegiatan PIPPK sangat dibutuhkan kinerja yang ekstra di tahun pertama pelaksanaan PIPPK apalagi di segi sosialisasi. Dari data yang telah peneliti dapatkan, terbukti bahwa hal tersebut berhasil dilakukan. Dapat dilihat dari rekapitulasi Kegiatan PIPPK tahun 2015 terlihat dari tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, hal tersebut mengindikasikan berhasilnya sosialisasi yang dilakukan aparatur kewilayahan terhadap LKK sehingga LKK mampu menyerap anggaran dengan baik. Saran dari peneliti adalah pertahankan kinerja yang telah dilakukan ditahun pertama ini.

Untuk sumber daya anggaran sudah cukup dan berfungsi sebagai stimulan. Untuk kedepannya disarankan untuk mempertahankan kecukupan anggaran. Kedepannya harus terus dikaji lagi mengenai jumlah penggunaan anggaran, jangan sampai anggaran yang diberikan berlebih sehingga yang terjadi dana yang diterima hanya sebagai charity, anggaran yang diberikan harus bisa menjadi pemicu dana swadaya dari masyarakat itu sendiri sehingga pemberdayaan benar-benar terjadi.

Untuk perilaku atau disposisi pelaksana kebijakan, di tingkat aparatur kewilayahan sudah sangat baik. Baik disisi kognitif maupun afektif, hal ini dipengaruhi adanya insentif yaitu berupa penghargaan, oleh karena itu saran peneliti adalah pertahankan insentif yang ada dan jika perlu ditambahkan kembali untuk meningkatkan disposisi baik kognitif maupun afektif tidak hanya ditingkat

kecamatan, namun di tingkat kelurahan, maupun tingkat RW dan sederajat. Untuk SOP diharapkan tidak ada perubahan dasar hukum lagi agar kebingungan yang pernah terjadi tidak terulang lagi.

## Daftar Pustaka

### **Buku :**

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, 1991, Jakarta; Bumi Aksara
- Abraham Kaplan, Harold dan Lanswell, *Power and Society*. (New Heaven : Yale University Press, 1970)
- Agustino, Leo. (2006), *Politik dan Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- George, C. Edwards III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Kartasmita, Ginanjar. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, (Jakarta: Bappenas, 1996)
- Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta, CSIS, 1996)
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998)
- Prof, Dr. Budi Winarno, MA, 2007, *Kebijakan Publik, teori, dan Proses*, Jakarta: Media Pressindo
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Media Elek Komputindo.

- Maleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Edisi-1, Cetakan ke-1, Referensi (GP Press Group), Jakarta.
- Prabowo (1996). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Parsons, Wayne (1995) *Public Policy: An Introduction To The Theory And Practice Of Policy Analysis*. Us: Edward Elgar Publishing Company.
- Pattn, Carl M dan Sawicki, David S. (1987). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain & Metode* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial Bandung*. PT. Refika Aditama.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Ganesha.

Website :

<https://www.yohanli.com/upaya-pemerataan-pembangunan.html>. Upaya pemerataan pembangunan, Diakses pada 18/11/16 pukul 15:45

<https://portal.bandung.go.id/posts/2016/02/11/dOAE/launching-pippk-2016> diakses pada 18/11/16 pukul 15.30

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html> diakses pada 11/10/2016

<http://www.artikelsiana.com/2015/06/kebijakan-publik-pengertian-macam-fungsi-fungsi.html?m1> di akses pada 11/10/2016

Peraturan :

Perwal Kota Bandung No. 281 Tahun 2015 Mengenai PIPPK

Juknis PIPPK 2015